

Dakwah Pencerahan Muhammadiyah Di Buton Masa Orde Lama

Muhammad Alifuddin¹, Rosmini², Yusup³, Fatira Wahidah⁴

¹ Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia. E-mail: proposalalif@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia. E-mail: rosmini@iainkendari.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia. E-mail: yusup@gmail.com

⁴ Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia. E-mail: fatirawahidah@iainkendari.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara analitik tentang “*Pola Gerakan Dakwah Muhammadiyah di Buton Masa Orde Lama*.”. Data-data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara mendalam, pengamatan dan telaah atas sejumlah dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Seluruh data dianalisis berdasarkan mekanisme dan prosedur kerja sejarah, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, gerakan dakwah Muhammadiyah di Buton setelah masa kemerdekaan dimulai pada tahun 1955. Dakwah Muhammadiyah pada masa ini, focus pada upaya mencerahkan akal budi, penguatan pengamalan agama dan menjauhkan masyarakat dari prilaku *bid'ah, takhyul* dan *khurafat*. Hingga tahun 1960 pola pendekatan dakwah Muhammadiyah di Buton didominasi model dakwah *bi al-lisan* (verbal) dan “cenderung” bersifat reaktif terhadap tradisi keberagamaan masyarakat setempat. *Kedua* Memasuki awal tahun 60-an, pola *bi al-lisan* (verbal) berpadu dengan aksi sosial dan pemberdayaan. Yaitu memberi santunan kepada kelompok lemah dan mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Capaian terpuji Muhammadiyah pada tahun 1961, ketika organisasi ini berhasil mendirikan sekolah Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) di Bau-Bau.

Kata Kunci: Dakwah Muhammadiyah; Buton; Orde Lama; Pola Gerakan; Pendidikan Guru Agama Pertama

1. Pendahuluan

Dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan Muhammadiyah. Dengan kata lain, dakwah merupakan penanda eksplisit dari Muhammadiyah. Haedar Nashir menyebutkan bahwa dakwah merupakan DNA Muhammadiyah yang bertujuan mengejawantahkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* dengan sasaran atau subjek dakwah dari seluruh kelompok dan lapisan masyarakat (Umar, 2017). Untuk mengimplementasikan hal tersebut, oleh Muhammadiyah, dakwah digandengkan dengan giat-giat sosial kemanusiaan, baik dalam bentuk karitas, pemberdayaan, maupun untuk pencerahan akal budi masyarakat (Umar, 2017). Penelitian Fahmi Riadi tentang dakwah Muhammadiyah di Banjarmasin, demikian pula dengan penelitian Alwi di Sulawesi Selatan, keduanya menyebutkan bahwa dalam menjalankan misi dakwah di ruang sosial, Muhammadiyah tidak hanya terpaku pada model dakwah verbal (pendekatan *bi al-lisan*) tetapi mengintegrasikan beragam pendekatan, baik yang sifatnya verbal-narratif, tulisan maupun aksi lapangan (*bi al-amal*) (Alwi, 2013; Riadi, 2014).

Kiprah dakwah dan pencerahan Muhammadiyah berjalan berkelindang dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, ketika Nusantara masih di bawah hegemoni penjajah Belanda dan Jepang, Muhammadiyah telah membersamai mendampingi dan memberdayakan umat melalui beragam kegiatan sosial dan pemberdayaan (Arfandi, 2016). Dalam konteks tersebut menjadi urgen melakukan penelitian guna mengungkap aktivitas dakwah Muhammadiyah di berbagai wilayah Nusantara. Dengan cara sedemikian, umat tidak kehilangan jejak sejarah dari perjuangan umat Islam yang dilakukan komunitas Muhammadiyah dalam usahanya mencerahkan pemikiran bangsa Indonesia, khususnya kalangan umat Islam.

Penelitian tentang kiprah dakwah Muhammadiyah di Nusantara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun umumnya penelitian tentang hal terkait merupakan uraian general mengenai aktivitas dakwah Muhammadiyah. Selain itu, uraian tentang Muhammadiyah dalam sejumlah penelitian didominasi oleh fenomena Muhammadiyah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan di wilayah Timur Indonesia. Sementara bagaimana aktivitas dakwah Muhammadiyah di daerah-daerah lain, khususnya pada wilayah Timur Indonesia belum banyak tersentuh. Kalaupun ditemukan, maka tema penelitian umumnya merupakan deskripsi tentang dakwah Muhammadiyah era kontemporer, sementara bagaimana dakwah Muhammadiyah pada masa sebelum kemerdekaan dan masa Orde Lama sangat langkah ditemukan. Di Buton Sulawesi

Tenggara, sekalipun jejak Muhammadiyah telah ditemukan sejak tahun 1929, namun bagaimana giat dakwah Muhammadiyah pada masa tersebut pun dengan masa awal-awal kemerdekaan tidak ditemukan.

Dalam konteks ruang Sulawesi Tenggara, kajian tentang kiprah dakwah Muhammadiyah pada masa Orde Lama antara lain dapat ditelaah pada tulisan Yahya Obaid dan Muhammad Alifuddin, namun lokus kajiannya di Kolaka dan Kendari. Selain Obaid dan Alifuddin, terdapat dua hasil penelitian tentang Muhammadiyah di wilayah eks kesultanan Buton yaitu: Suhendi Syam, *The Role Of Muhammadiyah In Building The Civilization Of The Community Of The Buton Islands* (Syam, 2021), dan yang kedua oleh Alifuddin, *Gerakan Islam Berkemajuan (Dakwah dan Pencerahan Muhammadiyah di Wakatobi)* (Alifuddin, 2021). Penelitian Syam sungguhpun mengurai tentang Muhammadiyah di Buton, namun cakupan kajiannya lebih banyak mendeskripsikan tentang peran Muhammadiyah pada era reformasi (kontemporer), sedangkan bagaimana Muhammadiyah menggerakkan dakwah masa Orde Lama belum tersentuh pada kajian tersebut. Begitu pula begitu pula dengan penelitian kedua yang mengambil lokus Wakatobi lebih banyak mengurai dakwah pencerahan Muhammadiyah era Orde Baru dan pasca-reformasi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menelisik kiprah gerakan dakwah Muhammadiyah di Buton masa Orde Lama. Sebagai upaya akademik dengan tujuan mengisi ruang kekosongan informasi tentang gerakan dakwah Muhammadiyah masa awal kemerdekaan di Buton, maka melalui penelitian diharapkan data-data tentang gerak dakwah Muhammadiyah terungkap secara jelas. Sesuai dengan fokusnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan merujuk pada data-data kualitatif. Sebagai penelitian yang berupaya memotret realitas masa lalu, meniscayakan peneliti menjalankan penelitian ini berdasarkan mekanisme dan prosedur kerja sejarah. Data primer penelitian bersumber dari data-data tertulis berupa dokumen seperti: buku, arsip pemerintah dan organisasi terkait, hasil penelitian, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada sejumlah tokoh Muhammadiyah serta para pihak yang memahami fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh dianalisis melalui mekanisme: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013; Nugroho Notosusanto, 1978).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah untuk mengungkap fakta secara kronologis dan analitis. Sebagai penelitian yang berupaya memotret realitas masa lalu, peneliti menjalankan prosedur kerja sejarah yang meliputi empat tahapan utama, yakni: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari data tertulis berupa dokumen arsip pemerintah, buku, dokumen internal organisasi Muhammadiyah, serta surat kabar dan majalah yang relevan. Selain data tekstual, peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada sejumlah tokoh Muhammadiyah dan pemangku kepentingan yang memahami lokus penelitian guna memperkuat akurasi data. Seluruh data yang terkumpul kemudian dikritik dan diinterpretasikan untuk menghasilkan narasi sejarah yang objektif mengenai pola gerakan dakwah Muhammadiyah di Buton pada masa Orde Lama.

3. Temuan dan Diskusi

3.1. Genealogi Gerakan Muhammadiyah di Buton

Dalam perspektif historis, gerakan Muhammadiyah masuk di Buton pada tahun 1929. Gerakan ini ditransmisikan oleh seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda yang dipindahugaskan ke Bau-Bau dari Makassar untuk mengajar dan atau menjadi seorang guru. Sosok dimaksud adalah Ahmad Makkarausu Amansyah Dg. Ngilau. Nama lain yang juga tercatat sebagai pelopor masuknya ide-ide Muhammadiyah di Buton yaitu Ponzen Dg. Mangawing dan seorang bumiputera asal Buton La Sadini (Depdikbud, 1978; Alifuddin, 2007). Namun demikian, perlu dicatat bahwa gerakan Muhammadiyah yang mengusung misi modernisme Islam dan berupaya mendakwahkan pemurnian Islam dari “virus” takhayul, *bid’ah*, dan *khurafat*, kurang kompatibel dengan tradisi mayoritas masyarakat muslim Nusantara. Realitas tersebut terkadang menjadi salah satu penghalang dan penghambat dari aktivitas Muhammadiyah di satu daerah. Hal yang sedemikian juga dialami oleh Muhammadiyah ketika awal mula berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya Buton.

Kultur Islam Buton yang berbasis pada paham tasawuf *martabat tujuh* menjadi hambatan tersendiri bagi gerakan Muhammadiyah untuk mengembangkan aktivitasnya. Akibat dari hal itu semua, pihak kesultanan tidak dapat mengakomodasi kehadiran Muhammadiyah karena dikhawatirkan akan memicu pertentangan di lingkungan internal umat Islam. Yaitu antara masyarakat Buton yang lebih cenderung berpaham Islam tradisional dengan agen-agen Muhammadiyah yang mengampanyekan gerakan anti-takhayul, *bid’ah*, dan *khurafat*. Dengan

kata lain, gerakan Muhammadiyah mendapat “penolakan” dari pemuka-pemuka agama setempat yang umumnya berafiliasi pada paham lama (*martabat tujuh*) (Depdikbud, 1978; Alifuddin, 2007).

Aspek lain yang menyebabkan Muhammadiyah pada masa sebelum kemerdekaan belum dapat berkembang dengan baik adalah hambatan dari pihak penjajah Belanda. Pihak Belanda menemukan indikasi kuat bahwa agen-agen Islam modern asal Muhammadiyah yang kala itu bertugas sebagai guru, selain menjalankan tugas mengajar, juga menyuntikkan paham nasionalisme pada siswa dan murid-murid mereka di sekolah. Sehingga pihak Belanda merasa terganggu dengan “manuver” agen-agen Muhammadiyah yang menyuntikkan gagasan nasionalisme di kalangan pelajar. Atas hal tersebut, Belanda kemudian mengambil tindakan administratif kepada Dg. Ngilau yang dipandang sangat membahayakan keberlanjutan eksistensi mereka di tanah Buton dengan memindahkannya ke Kendari pada tahun 1930. Sejak kepindahan Dg. Ngilau, sinar gerakan Muhammadiyah perlahan-lahan redup (Depdikbud, 1978).

3.2. Muhammadiyah Buton Masa Orde Lama

Sepuluh tahun setelah Indonesia merdeka, Muhammadiyah merekonstruksi keberadaannya di Buton. Abdul Gani Ali, salah seorang tokoh Muhammadiyah yang berdiam di Buton sejak awal tahun 1960, menyebutkan bahwa pada tahun 1955 “Sang Surya” kembali bergema di tanah Buton. Suara dan gerak Muhammadiyah pada waktu itu digaungkan oleh seorang kader dan mubalig Muhammadiyah asal Sulawesi Selatan bernama Raja Lung Dg. Mattula. Ia adalah seorang pegawai kantor perdagangan yang bertugas di Bau-Bau. Upaya Dg. Mattula mengaktualkan Muhammadiyah di Buton setelah lama vakum dilakukan melalui dakwah, yaitu dengan membentuk jemaah dan menyelenggarakan pengajian kepada masyarakat setempat. Dg. Mattula juga mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pemuka masyarakat setempat guna memperkenalkan Muhammadiyah. Walhasil, organ Muhammadiyah kembali mendapat simpatik dari sejumlah kalangan sehingga sejumlah orang bergabung dan selanjutnya ikut menggerakkan Muhammadiyah. Di antara kader-kader binaan Dg. Mattula yang kemudian hari menjadi penggerak Muhammadiyah Buton adalah: Laode Tua Makmun, Laode Hamiru, Abd. Wahab Dg. Mattata, Abdul Gani Ali Dg. Mappuji, Ambo Masse, H. Mustari Said, H. Abdul Rahman, dan Abdul Muin Dg. Magassing (Alifuddin, 2007; Syam, 2021).

Pada masa selanjutnya, untuk mengokohkan bangunan Muhammadiyah di Buton dan upaya menjadikannya lebih terarah serta terorganisasi secara rapi, maka sejumlah orang yang telah bergabung dengan Muhammadiyah membentuk kepengurusan Muhammadiyah Buton. Terpilih sebagai ketua Muhammadiyah pada waktu itu adalah Laode Hamiru. Setelah kepengurusan Muhammadiyah terbentuk, mereka kemudian mengambil langkah-langkah konkret untuk membumikan gerakan Muhammadiyah di Buton. Langkah konkret strategis sebagaimana dimaksud adalah menggerakkan dakwah Muhammadiyah, baik dalam bentuk tablig (verbal) maupun melalui sejumlah kegiatan sosial filantropi di ruang publik. Bahkan gerakan Muhammadiyah pada masa tersebut ikut terlibat aktif mengawal ideologi bangsa Indonesia dari ancaman infiltrasi paham komunis di Buton. Berikut ini deskripsi sejumlah kegiatan Muhammadiyah Buton pada masa awal kemerdekaan.

a) Menggaungkan Literasi Keagamaan

Pada masa awal keberadaannya di Buton, yaitu tahun 1955, ide-ide keislaman perspektif Muhammadiyah ditransmisikan melalui *tabligh* oleh para anggotanya. Dalam upayanya mengonstruksi gerakan Muhammadiyah di Bau-Bau, Buton setelah lama vakum, maka para penggerak Muhammadiyah Buton masa pascakemerdekaan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Langkah tersebut sesuai dengan karakter dasar warga Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), yang menyebutkan bahwa warga Muhammadiyah niscaya bersosialisasi dan membaur dengan masyarakat (Muhammadiyah.or.id, [Tahun]). Ali menjelaskan bahwa Dg. Mattula sebagai pelopor kebangkitan Muhammadiyah pada masa Orde Lama (setelah kemerdekaan) menjadikan rumahnya sebagai ruang belajar, dengan tujuan untuk meningkatkan literasi keagamaan masyarakat setempat. Selain mengajar mengaji kepada anak-anak, ia juga menyelenggarakan pengajian khusus, terutama kepada mereka yang sejalan dengan ide Muhammadiyah. Media pengajian sebagaimana dimaksud selain bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan spiritual berbasis Islam, sarana tersebut oleh Dg. Mattula dijadikan sebagai jembatan mengalirkan gagasan pembaharuan Islam sekaligus sebagai sarana pendidikan bagi kader-kader muda Muhammadiyah.

Pada masa antara tahun 50-an hingga awal 70-an, sifat menonjol narasi keagamaan yang didengungkan oleh kader-kader mubalig Muhammadiyah adalah melakukan pemurnian atau gerakan pemurnian Islam dari *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat* (TBC). Pada masa ini, salah seorang kader Muhammadiyah Buton yang sangat gencar mengampanyekan pemberantasan TBC adalah Laode Tua Makmun. Halima (istri Makmun) menjelaskan bahwa Makmun biasa terlibat dialog interaktif untuk tidak mengatakan “debat” dengan kelompok muslim tradisional di Bau-Bau. Tema diskusi yang melibatkan Makmun dengan tokoh agama setempat merupakan problem-problem khilafiyah, umumnya terkait dengan masalah fikriyah. Seperti masalah pelafalan niat, qunut subuh, azan dua kali di hari Jumat, penggunaan bedug, dan lain-lain.

Selain itu, terdapat pula sejumlah tradisi lokal di sekitar masalah upacara kematian yang mendapat kritik tajam dari kader-kader Muhammadiyah. Yang tidak terlupakan oleh Halima adalah penentangan Makmun terhadap penggunaan “beduk” (Halimah, wawancara; Alifuddin, 2007; Syam, 2021). Anshari Idris menyebutkan bahwa kelompok Muhammadiyah yang dipelopori oleh Makmun sangat gencar mengampanyekan penolakan atas tradisi pembacaan *Barzanji* yang kerap dilakukan oleh masyarakat Buton (Idris, wawancara; Alifuddin, 2007; Syam, 2021).

Pendekatan dakwah sedemikian berimplikasi pada “keterbelahan” di tengah masyarakat, yaitu antara Muhammadiyah di satu sisi dengan masyarakat setempat yang masih mempertahankan tradisi keberagamaan yang mereka warisi turun-temurun.

b. Giat Sosial Kemanusiaan

Selain membangun literasi keagamaan melalui gerakan belajar mengaji dan tablig (menyampaikan ajaran Islam melalui narasi verbal), komunitas Muhammadiyah Buton pada masa 1955 hingga awal 1970-an menjalankan serangkaian aktivitas sosial di tengah masyarakat, yaitu:

(i). Gerakan Filantropi

Filantropi adalah gerakan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang atas dasar cinta dan kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada kaum lemah. Dalam Muhammadiyah, gerakan filantropi menjadi salah satu keniscayaan sehingga sejak mula keberadaannya, Muhammadiyah selalu mensinergikan antara giat dakwah dalam bentuk verbal dengan tindak kerja nyata di ruang sosial. Hafidz Arfandi menyebutkan bahwa

filantropi setali tiga uang dengan pergerakan Muhammadiyah (Arfandi, 2016; Latif, 2017). Warga atau para aktivis memiliki etos yang kuat pada kerja-kerja sosial kemanusiaan, kedermawanan, cinta, dan peduli pada sesama (Ammar, 2017). Kuatnya citra kepedulian dalam pergerakan Muhammadiyah terbukti dengan terbangunnya ribuan Amal Usaha Muhammadiyah yang didedikasikan pada rakyat Indonesia. Menjamurnya Amal Usaha Muhammadiyah di Nusantara merupakan indikasi eksplisit untuk menyatakan bahwa kelompok sosial yang memilih bergabung dengan Muhammadiyah adalah subjek berkarakter filantropi (Alifuddin, 2020; Tohari, 2015).

Menurut Subair, salah satu giat sosial yang dilakukan oleh gerakan Muhammadiyah adalah pemberian santunan kepada kelompok masyarakat lemah dan anak yatim. Aktivitas ini menurut Subair merupakan implementasi dari gerakan *Al-Ma'un* yang telah mendarah daging dalam kultur Muhammadiyah. Gerakan sosial Muhammadiyah berupa pemberian santunan kepada komunitas dhuafa dan anak-anak yatim membuat Muhammadiyah semakin mendapat simpati masyarakat pada masa Orde Lama (Subair, wawancara).

(ii). Pencerahan Akal Budi

Salah satu karakter dasar orang Muhammadiyah adalah kepeduliannya terhadap pendidikan. Kepedulian Muhammadiyah terhadap masalah pendidikan setidaknya ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan yang dibangun oleh organisasi ini. Peachok menyebutkan bahwa 13 tahun setelah pendiriannya, Muhammadiyah telah membangun ratusan lembaga pendidikan di semua tingkatan. Menurut Subair, Muhammadiyah telah memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat Bau-Bau (Buton) sejak tahun 1960. Muhammadiyah mendirikan TK, SD Islam, dan Sekolah Menengah Islam Muhammadiyah (SMIM). Pada tahun 1961, SMIM bermetamorfosis menjadi PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama) Muhammadiyah di Bau-Bau. Sekolah PGAP Muhammadiyah menjadi lembaga pendidikan guru agama yang pertama didirikan di Bau-Bau. Bertindak sebagai Kepala Sekolah PGAP pada waktu itu adalah Ustad Bine. Pascapeleburan SMIM menjadi PGAP

Muhammadiyah, maka pada tahun 1965 Muhammadiyah mendirikan SMP Muhammadiyah sebagai pengganti SMIM.

PGAP Muhammadiyah Buton didirikan di atas tanah hibah dari Sultan Buton La Ode Falihi. Lahan tersebut dihibahkan kepada Muhammadiyah setelah Sultan menyaksikan dedikasi dan kesungguhan eksponen Muhammadiyah dalam melakukan upaya-upaya sosial kepada masyarakat Buton pada waktu itu. Menurut Subair, biaya pembangunan sekolah PGAP Muhammadiyah antara lain didapatkan dari sumbangan Pangdam XIV Hasanuddin, yaitu Jenderal M. Jusuf. Selain dari Jenderal M. Jusuf, Muhammadiyah juga memperoleh sokongan dana pembangunan dari Andi Syamsu Alam yang saat itu menjabat sebagai Dandim Buton (Subair, wawancara). Pada perkembangan selanjutnya, PGAP Muhammadiyah mengalami kemunduran karena di tempat yang sama pemerintah mendirikan PGA Negeri yang memiliki fasilitas dan tempat yang lebih memadai. Meski demikian, PGAP yang didirikan oleh Muhammadiyah Buton tercatat sebagai perintis berdirinya sekolah guru agama di Buton (Suara Muhammadiyah, 1989).

(iii). Gerakan Bela Negara

Dalam dokumen *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, Muhammadiyah tercatat sebagai salah satu pergerakan sosial yang mengalirkan gagasan kebangsaan. Upaya tersebut dilakukan Muhammadiyah guna membangkitkan kesadaran nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, baik di Kendari, Buton, maupun Muna (Depdikbud, 1978; Alifuddin, 2020).

Membangun kesadaran nasionalisme dapat dikategorikan sebagai bagian dari dakwah *amar makruf nahi mungkar*. Gerakan sosial Muhammadiyah melalui penantangan terhadap kebijakan-kebijakan politik otoritarian terus berlanjut hingga masa setelah kemerdekaan. Sebagaimana diketahui, pemerintah Orde Lama di bawah Presiden Soekarno pada masa tahun 60-an “tergoda” oleh ide-ide kerakyatan dari Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga Soekarno menjadi sangat dekat dengan tokoh-tokoh PKI dan memberi ruang leluasa bagi PKI untuk melakukan gerak sosial di tengah masyarakat. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh PKI untuk menyusun kekuatan dengan

tujuan akhir menguasai dan menjadikan Indonesia berada di bawah pengaruh komunisme.

Dalam upaya merealisasikan cita-citanya, gerakan komunisme Indonesia melakukan serangkaian usaha untuk menguasai Indonesia, meskipun hal itu dilakukan dengan cara-cara anarkis, kekerasan, dan melampaui dasar etika kemanusiaan. Data sejarah menyajikan fakta bahwa salah satu tragedi kemanusiaan dalam perjalanan sejarah Indonesia adalah peristiwa G 30 S PKI. Kekuatan komunisme yang terkonsolidasi melakukan gerakan pembantaian terhadap 7 Jenderal Angkatan Darat. Tindakan super ekstrem dari Partai Komunis Indonesia (PKI) terjadi pada 30 September 1965. Peristiwa kemanusiaan tersebut sesungguhnya bukan satu-satunya peristiwa berdarah yang dilakukan PKI. Pada September 1948, tindak teror kekerasan kemanusiaan juga dilakukan oleh PKI di Madiun (Tempo, 2015). Peristiwa ini menelan ratusan bahkan ribuan korban manusia termasuk di dalamnya para ulama. Berangkat dari peristiwa dan pengalaman sejarah sebelumnya serta sebagai upaya menghindari jatuhnya korban lebih banyak akibat kekerasan PKI, maka sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam membentuk laskar rakyat. Di lingkungan Muhammadiyah dibentuk KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) sebagai organ para militer Muhammadiyah.

Guna membendung gerakan komunisme yang masif, PP Muhammadiyah mengeluarkan instruksi eksplisit kepada setiap cabang untuk membentuk KOKAM. Di Bau-Bau/Buton, sebagaimana di daerah lainnya, KOKAM juga dibentuk. Menurut Basir, pembentukan KOKAM di Buton berawal dari seorang utusan kader Muhammadiyah asal Makassar. Utusan dimaksud datang membawa perlengkapan KOKAM dan menemui sejumlah jemaah Masjid Raya Bau-Bau. Kepada jemaah masjid pada waktu itu utusan dari Makassar bertanya; apakah di daerah ini ada Muhammadiyah? Mendengar pertanyaan tersebut Hamimu Maada menjawab ada. Kepada para jemaah disampaikan, PKI sudah bergerak, jika kalian lengah maka kalian akan mati. Mendengar penyampaian tersebut, maka malam itu juga dibentuk KOKAM. Komandan KOKAM pada waktu itu adalah Laode M-bai Maswar, BA. (Maswar, wawancara), sedangkan Pimpinan pergerakannya di lapangan adalah Hamimu Ma-ada, dengan anggota masing-masing Faatmahonde, Nuki Basir,

Laode Kaimuddin, Abu Ini, Muswar, Bahar Baso Hamba dan Ahmad Latenggo (Basir, wawancara).

Tidak menunggu waktu lama, pasca pembentukannya, KOKAM Buton segera melakukan konsolidasi, karena sehari setelah KOKAM resmi berdiri, terdengar berita bahwa rumah kediaman KH. Asy-ari sedang dalam pengintaian PKI. Atas informasi tersebut seluruh anggota KOKAM dikerahkan untuk mengamankan rumah KH. Asy-ari. Hari berikutnya KOKAM kembali bergerak melakukan penyerbuan terhadap markas PKI/LEKRA di depan SMP I lama di Batulo, namun karena PKI/LEKRA mengetahui gerakan penyerbuan yang direncanakan oleh KOKAM, maka para anggota PKI/LEKRA melarikan diri di antaranya ada yang lari ke Batauga (Basir, wawancara). Lebih lanjut Basir menjelaskan bahwa masa-masa menegangkan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan, selama masa tersebut KOKAM terus berpatroli mengawasi gerakan LEKRA di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk menambah keterampilan KOKAM dalam menjalankan tugas pengintaian, mereka dibekali dengan latihan militer oleh Komandan Kodim Buton yaitu Sadiran. Kepada sejumlah anggota KOKAM Sadiran mengajarkan bagaimana melakukan pergerakan, pengintai, dan teknik dalam melumpuhkan lawan.

3.3. Pembahasan

Mengacu pada data sejarah sebagaimana diungkapkan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa tahun 1955 adalah masa gerakan Muhammadiyah Buton kembali bereksistensi setelah masa kemerdekaan. Pasca pengukuhan kembali keberadaannya di Buton, para agen Muhammadiyah bergerak mensosialisasikan plus berusaha membumikan “paham” Muhammadiyah melalui serangkaian aktifitas dakwah. Guna mengurai lebih lanjut bagaimana pola Muhammadiyah menggerakkan aktivitas dakwah di tanah Buton, maka data-data deskriptif mengenai hal terkait akan dianalisis dengan mengacu pada konsep implementasi dakwah. Yaitu dakwah sebagai serangkaian cara dan proses dalam menyampaikan nilai-nilai agama Islam kepada manusia dengan cara atau pendekatan serta tujuan yang sesuai atau dapat dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Dalam pembahasan ini, term dakwah secara khusus digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan atau hal-hal yang mengandung manfaat bagi kehidupan manusia (Departemen Agama) . Dakwah memiliki dua komponen utama yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Pertama, dakwah sebagai suatu proses penyampaian nilai ajaran

Islam baik secara lisan (tabligh) maupun tulisan. Kedua, dakwah sebagai proses implementasi nilai-nilai normatif Islam secara praksis-amaliah dalam kehidupan nyata dan dalam berbagai bidang lapangan kehidupan, meliputi bidang sosial-budaya, politik, ekonomi, filosofis, dan lain-lain (Tampubolon, 2016).

Dengan mengacu pada konsep di atas, maka gerakan dakwah Muhammadiyah di Buton dalam implementasinya dapat dipilih menjadi pada dua bentuk atau pola, yaitu: dakwah dalam bentuk tablig (*bi al-lisan*) dan dakwah dalam bentuk tindakan nyata di ruang publik.

a). Dakwah *bi al-lisan*

Model dakwah secara verbal dan atau mengandalkan kemampuan bertutur dalam menyampaikan pesan. Dalam konteks dakwah Islam, konten dakwah *bi al-lisan* umumnya mencakup tiga hal yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Kontributor utama dalam pola ini adalah seorang dai atau biasa juga disebut mubalig (penceramah agama) yang umumnya tampil secara perorangan. Dalam implementasinya, pola ini menggunakan media mimbar, ruang kelas, aula, dan atau tempat-tempat di mana orang bisa berkumpul. Tampaknya, inilah adalah salah satu model dakwah yang digerakkan oleh agen Muhammadiyah ketika mencoba mengaktualkan kembali keberadaannya di Buton.

Pengajian anak-anak dan ceramah agama sebagaimana disebutkan dalam uraian temuan menjadi jembatan Muhammadiyah dalam mentransmisikan misi organisasi dan paham keagamaan yang mereka yakini. Selain ceramah, dakwah *bi al-lisan* juga memungkinkan untuk dilakukan dengan cara dialog (diskusi). Cara ini juga nampak dilakukan oleh agen-agen dakwah Muhammadiyah di Buton. Sebagaimana penjelasan Halimah yang menyebutkan bahwa Makmun (suaminya) terkadang terlibat diskusi “panas” dengan sejumlah kalangan (Halimah, wawancara). Sekalipun bukan merupakan kecenderungan umum, namun dakwah *bi al-lisan* dengan pendekatan “konfrontatif” terkadang dilakukan oleh agen-agen Muhammadiyah. Makmun contohnya, merupakan salah satu figur agen Muhammadiyah berkarakter antitesis, khususnya terhadap praktik-praktik keagamaan masyarakat setempat yang ia pandang terkontaminasi oleh *bid'ah*, takhayul, dan khurafat.

Dakwah dengan cara antitesis, “melawan” secara terbuka atas pengamalan tradisi keberagamaan masyarakat tidak hanya berimplikasi pada penolakan terhadap misi dakwah, tetapi juga terkadang menjadi penyebab konflik dalam internal umat Islam. Tidak dapat disangkal pola ini terkadang ditempuh oleh agen-agen

Muhammadiyah pada masa lalu. Pendorongnya berbasis pada semangat memurnikan ajaran Islam dari takhayul, bid'ah, dan khurafat. Namun demikian, dipastikan pendekatan dakwah yang bersifat antitesis sebagaimana disebutkan bukanlah satu-satunya pendekatan yang diterapkan oleh agen-agen Muhammadiyah. Sebab, jika cara tersebut menjadi pendekatan utama Muhammadiyah, maka eksistensi Muhammadiyah masa Orde Lama di Buton akan mengalami resistansi dari masyarakat serta berasib sama ketika Muhammadiyah untuk pertama kali berada di Buton yaitu tahun 1929. Pada saat itu, keberadaan organ ini ditolak oleh pihak kesultanan karena dipandang dapat memicu konflik antarumat Islam (Depdikbud, 1978). Bukti lain untuk semakin meyakinkan bahwa gerakan dakwah Muhammadiyah masa Orde Lama dijalankan secara elegan adalah respons positif pihak kesultanan atas kehadiran Muhammadiyah yang ditandai dengan pemberian tanah hibah untuk membangun sekolah.

b). Dakwah *bi al-amal*.

Orde Lama adalah ruang dan masa gejolak politik yang sangat dinamis. Kondisi negara yang baru bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, serta upaya pihak Belanda untuk kembali menanamkan kuku kekuasaannya di tanah air menyebabkan negara berada dalam situasi ekonomi yang sangat sulit. Kondisi ekonomi pada masa ini amat buruk, indikasinya terlihat pada tingkat inflasi yang mencapai hingga ratusan persen. Mata uang Indonesia tidak terkendali, sementara beban utang sangat besar. Fakta ini menjadikan pemerintah menghadapi kesulitan membangun infrastruktur dan industri. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan bersifat politis semakin memperparah kondisi ekonomi, dan krisis ini mencapai puncaknya pada tahun 1963-1965.

Dalam kondisi sedemikian Muhammadiyah hadir di Buton. Kehadiran Muhammadiyah di Buton jelas bertujuan mencerahkan pikiran dan kehidupan masyarakat setempat. Merujuk pada keterangan Subair sebagaimana telah dikutip sebelumnya, bahwa salah satu bentuk kegiatan Muhammadiyah pada masa 1955 hingga jatuhnya PKI adalah menggerakkan santunan kepada anak yatim dan kelompok lemah lainnya. Realitas ini menunjukkan bahwa dakwah Muhammadiyah tidak sebatas pada gerakan tablig. Yaitu menganjurkan kebaikan melalui pendekatan verbal naratif, tetapi juga dipadu dengan tindak sosial nyata di tengah masyarakat. Tindak karitatif sebagaimana disebutkan merupakan tradisi yang melekat dengan Muhammadiyah, karena sejak mula pertama organisasi dikembangkan, para penggeraknya telah

membangun rumah dan panti asuhan untuk memberi layanan sosial kepada kelompok lemah.

Giat sosial lain yang dapat dikategorikan sebagai bagian integral dari dakwah *bi al-amal* Muhammadiyah di Buton pada masa Orde Lama adalah “ketulusan” warga Muhammadiyah memfasilitasi pendidikan. Upaya Muhammadiyah menyediakan fasilitas pendidikan di Buton pada masa Orde Lama, selain untuk memenuhi tuntutan hak-hak dasar pendidikan bagi anak, juga karena tuntutan realitas sosial masyarakat pada masa tersebut. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia pada masa Orde Lama dihadapkan pada berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu imbas dari kondisi tersebut adalah akses pendidikan yang tidak merata, khususnya di kawasan yang jauh dari pusat kekuasaan.

Menghadapi fenomena tersebut, komunitas Muhammadiyah Buton berinisiatif positif membantu pemerintah memenuhi asa masyarakat untuk mendapat akses pendidikan dengan mendirikan fasilitas layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Upaya tersebut merupakan sumbangsih Muhammadiyah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai implementasi dari amanat pembukaan UUD 1945 sekaligus sebagai implementasi dari kebijakan pendidikan nasional sebagaimana termuat pada Pasal 30 UUDS 1950 RI, ayat 1, yaitu; *tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran* (Fadli & Kumalasari, 2019). Langkah mendirikan lembaga pendidikan ditempuh karena Muhammadiyah menyadari bahwa pendidikan adalah kebutuhan dan menjadi hak bagi setiap warga negara. Melalui pendidikan, individu dan masyarakat suatu bangsa dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dan melalui pendidikan, individu, keluarga, dan negara dapat menanamkan sekaligus melestarikan nilai luhur dan nilai-nilai budaya bangsa. Karena itulah pendidikan menjadi sesuatu yang niscaya (Rochanah, 2020).

Deskripsi temuan tentang aktivitas dakwah *bi al-amal* sebagaimana dilakukan oleh Muhammadiyah Buton pada masa Orde Lama, menyajikan fakta tentang sejarah gerakan dakwah Muhammadiyah, bahwa gerak dakwah Muhammadiyah tidak berhenti pada upaya menyeru atau mengajak masyarakat berbuat kebajikan dan meninggalkan hal-hal buruk, tetapi juga bagaimana mewujudkan kebajikan tersebut dalam ruang publik melalui perbuatan nyata dan terukur. Karena itu, Muhammadiyah kemudian melakukan *labelling* atas gerakan dakwahnya dengan menggunakan istilah dakwah

“pencerahan”. Konsep dakwah “pencerahan” berorientasi pada pengembangan dan atau untuk membangun relasi sosial berkeadilan, tanpa diskriminasi, memuliakan martabat kemanusiaan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan. Serta membangun pranata sosial sehat untuk semua. Dalam implementasinya, gerakan ini dilakukan baik dengan metode *bi al-lisan*, tulisan, dan *bi al-amal* (Qodir, 2019).

Realitas tersebut sekaligus menunjukkan bahwa giat pemberdayaan masyarakat melalui lembaga pendidikan, demikian pula dengan aktivitas karitas dalam bentuk santunan kepada masyarakat lemah melalui panti asuhan dan sejenisnya, merupakan aktivitas yang telah mengiringi perjalanan gerak dakwah Muhammadiyah. Kasus gerak dakwah sosial Muhammadiyah pada masa Orde Lama di Buton, sebagaimana tergambar pada uraian sebelumnya, semakin mengukuhkan bahwa pelabelan dakwah pencerahan secara empiris faktanya ditemukan di lapangan dan dilakukan secara konsisten berkelanjutan oleh Muhammadiyah baik pada masa kolonial, Orde Lama, hingga masa kini. Hal tersebut bersesuaian dengan temuan Arfandi yang menyebutkan bahwa kehadiran Muhammadiyah sebagai *volunteer sector* memberikan tiga dampak signifikan, yaitu: (1) Memperkuat sumber daya yang dimiliki negara, baik di saat krisis maupun di saat perekonomian membaik dalam rangka memberikan layanan sosial. (2) Memelihara jiwa solidaritas kolektif dalam masyarakat, pada saat yang sama menekan tingkat ketergantungan masyarakat pada layanan sosial negara. (3) Menjadi kekuatan penyeimbang dan penopang ketika negara dengan sengaja mengabaikan kewajibannya menyediakan layanan kesejahteraan pada masyarakat seperti di era kolonial. Dengan demikian, komitmen Muhammadiyah dalam mendorong kesejahteraan tidak kontra produktif dengan tujuan lahirnya negara maupun *welfare state*. Peran ini sama sekali berbeda dengan konsepsi yang diterapkan oleh beberapa kelompok Islamis, baik di dalam maupun di luar negeri, yang berkecenderungan memanfaatkan gerakan filantropi untuk menggerogoti legitimasi negara (Arfandi, 2016).

4. Penutup

Setelah “beku” pascaperkenalannya dengan Buton pada tahun 1929, Muhammadiyah kembali bereksistensi di Buton pada tahun 1955 (sepuluh tahun pascakemerdekaan Indonesia). Dg. Mattula tercatat sebagai salah seorang pelopor kebangkitan Muhammadiyah setelah masa kemerdekaan dan Orde Lama. Untuk mengukuhkan eksistensi Muhammadiyah Buton, Dg. Mattula menggerakkan dakwah Islam dengan jalan mendirikan lembaga pengajian bagi anak-anak setempat serta mendidik kader-kader muda penggerak Muhammadiyah. Gerakan tersebut melahirkan sejumlah kader aktivis persyarikatan yang menggerakkan dakwah sekaligus menjadi pengurus Muhammadiyah Buton.

Ada dua pola atau bentuk dakwah yang diejawantahkan oleh agen-agen Muhammadiyah di Buton, yaitu dakwah *bi al-lisan* (verbal naratif) dan dakwah *bi al-amal* (*positive action*). Penerapan pola pertama oleh agen-agen Muhammadiyah terkadang dilakukan dengan cara “reaktif konfrontatif”, khususnya dalam menyikapi sebagian tradisi keagamaan masyarakat setempat yang oleh agen-agen Muhammadiyah dipandang terkontaminasi oleh virus takhayul, *bid'ah*, dan khurafat. Meskipun demikian, cara “reaktif konfrontatif” bukan merupakan kecenderungan umum dari agen dakwah Muhammadiyah, sehingga organisasi ini tetap mendapat tempat di hati sebagian masyarakat.

Dalam upayanya mengejawantahkan keberadaan Muhammadiyah di Buton, agen-agen Muhammadiyah mengintegrasikan pesan-pesan keagamaan dengan tindak kerja nyata di ruang public diantaranya memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim dan kaum lemah lainnya. Selain hal tersebut, Muhammadiyah juga medirikan lembaga pendidikan tingkat dasar menengah guna memberdayakan dan mencerahkan akal budi masyarakat setempat. Sebagai ikhtiar dan komitmen Muhammadiyah untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang handal di tengah keterpurukan ekonomi pada masa Orde Lama, Muhammadiyah mendirikan sekolah Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP), yang pada gilirannya akan menjadi para pendidik bagi anak-anak setempat pada masa tersebut.

Daftar Pustaka

- Alifuddin, Muhammad. (2007) *Islam Buton (Interaksi Islam dengan Budaya Lokal)*. Jakarta: Balitbang Depag RI.
- Alifuddin, Muhammad. (2021) Gerakan Islam Berkemajuan (Dakwah dan Pencerahan Muhammadiyah di Wakatobi). *Al-MUNZIR*. 14(2), 167–190.
- Alwi, Muhammad. (2013) Gerakan Dakwah Muhammadiyah di Sulawesi-Selatan. *Diskursus Islam*. 1(1).
- Arfandi, Hafidz. (2016) Motif dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah. *Jurnal Muhammadiyah Studies*. 1(1).
- Departemen Agama RI. (1996) *AlQur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama.
- Depdikbud. (1979) *Sejarah Kebangkitan Nasional Sulawesi Tenggara*. Kendari: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Handayani, Puspita, Ima Faizah, dan Mochammad Alfan Rosid. (2020) Model Gerakan Dakwah Keagamaan Muhammadiyah: Studi Etnografi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. *Sosiologi Reflektif*. 15(1).
- Jainuri, Achmad. (2002) *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*. Surabaya: LPAM.
- Kuntowijoyo. (2013) *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Miles, Matthew B. & Huberman. (1986) *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Muhammadiyah.or.id. *Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH)*. Retrieved on <https://muhammadiyah.or.id/matan-keyakinan-dan-cita-cita-hidup-muhammadiyah/>.
- Munawir, Ahmad Warson. (1984) *Kamus al-Munawwir*. Jakarta: Pesantren al-Munawwir.
- Nakamura, Mitsuo. (1983) *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noer, Deliar. (1973) *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942: East Asian Historical Monographs*. Oxford: Oxford University Press.
- Notosusanto, Nugroho. (1978) *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Peacock, James L. (1968) *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*. Terj. Andi Makmur Makkah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. (1995) *Analisis Struktural dan Makna Mitos Orang Bajo*. Laporan Penelitian. UGM.
- Qodir, Zuli. (2019) Islam Berkemajuan dan Strategi Dakwah Pencerahan Umat. *Sosiologi Reflektif*. 13(2).
- Riadi, Fahmi. (2014) Pola Dakwah Muhammadiyah di Banjarmasin. *Jurnal al-Misbah*. 10(1).
- Syam, Suhendi. (2021) The Role Of Muhammadiyah In Building The Civilization Of The Community Of The Buton Islands. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*. 27(1).

Tampubolon, Ichwan. (2016) Dakwah Pencerahan: Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Muhammadiyah. *al-Muaddib*. 1(1).

Umar. (2017) Strategi Dakwah Kultural Muhammadiyah pada Ritual Adat Mappogau Hanua Masyarakat Karampuang Sinjai. *Afkaruna*. 13(2).